ANALISIS PASAR INTERNASIONAL DAN

MASA DEPAN INDUSTRI KEHUTANAN DI INDONESIA [[1]](#footnote-1)

Prof. Dr. Ir. John E. H. J. FoEh [[2]](#footnote-2)

Hutan merupakan sumberdaya alam terbarukan (renewable resource), yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena sifat multigunanya, terutama sebagai penghasil kayu dan hasil hutan non kayu lainnya. Hutan sebagai pelindung ekosistem, tanah dan tata air, sekaligus sebagai habitat margasatwa penyeimbang kondisi iklim yang sehat dan bersih serta sangat berperan dalam melindungi keaneka-ragaman hayati. Dengan kata lain, hutan tidak saja memberikan manfaat eksploitasi tetapi juga manfaat konservasi. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap hutan sebagai sumber devisa telah menyebabkan laju deforestasi yang cukup tinggi, -ke dua setelah Brasil.- Penyalah-gunaan hutan alam Indonesia yang secara administratif mempunyai luas sekitar 148 juta Ha, telah menyebabkan banjir dan erosi, degradasi lahan, longsor, kebakaran hutan, sampai pada meningkatnya pemanasan global? Pertanyaan klasik adalah, apakah hutan Indonesia masih bisa diharapkan sebagai penghasil devisa selain minyak bumi dan gas alam?

Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1968 hutan alam Indonesia mulai dieksploitasi secara besar-besaran oleh investor asing untuk menghasilkan devisa bagi NKRI. Kebijakan pemerintah sampai dengan tahun 1980 bertumpu pada ekspor kayu bulat guna mendukung perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sektor kehutanan menempati urutan kuat penghasil devisa negara sesudah migas. Trilogi pembangunan sebagai konsep waktu itu terutama ditujukan bagi peningkatan perdagangan luar negeri, penciptaan lapangan peker-jaan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional sebagai tujuan utama. Menyadari tentang pemerataan pembangunan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan maka pada awal tahun 80-an dimulai konsep industri kayu terpadu (integrated wood industry). Kebijakan ini membuat terjadinya pelarangan ekspor kayu bulat (log export ban) sehingga pada tahun 1985, -secara official- ekspor kayu bulat Indonesia sama dengan nol. Akibatnya, industri perkayuan di Indonesia -sekalipun dalam bentuk oligopili- berkembang pesat dan pada gilirannya menyebabkan Indonesia menjadi negara pengekspor kayu lapis nomor 1 di dunia sampai dengan tahun 1997. Kemajuan ini tidak sejalan dengan perkembangan Hutan Tanaman Industri untuk menggantikan peranan hutan alam sebagai penghasil bahan baku industri kayu primer maupun sekunder.

Keberlanjutan industri perkayuan di Indonesia yang bertumpu pada hutan alam menjadi ancaman dan sejak itu pula, negara-negara pengimpor mengenakan peraturan *“ecolabeling”* di mana produk industri perkayuan Indonesia harus diboikot kalau bukan berasal dari hutan tanaman. Pengetatan *ecolabel* ini menyebabkan kebijakan pembatasan penebangan hutan alam, pemanfaatan berbagai jenis kayu yang selama ini dianggap bukan jenis komersial sampai dengan pengembangan dan ekspliotasi hutan-hutan rakyat guna mengatasi kekurangan bahan baku kayu bagi industri kayu dalam negeri. Kebijakan impor juga mulai ditempuh sejak tahun 1999/2000. Keadaan hutan alam Indonesia makin parah karena reboisasi dan rehabilitasi yang berjalan lamban. Kerusakan hutan semakin diperparah dengan munculnya otonomi daerah di mana para bupati dapat merubah kawasan hutan yang masuk dalam kategori areal penggunaan lain (APL) untuk berbagai kepentingan seperti perkebunan, pertambangan maupun pemukiman. Pengrusakan hutan alam dan penyelundupan kayu serta *illegal logging* berkembang pesat dan areal hutan atau kawasan hutan yang benar-benar masih memiliki hutan menjadi semakin berkurang. Berbagai bencana alam serta peningkatan pemanasan global pun terjadi dan akibatnya memunculkan gagasan *moratorium* penebangan hutan alam.

Kebijakan moratorium terutama pada kawasan lindung, kawasan konservasi maupun pada ekosistem spesifik seperti pada lahan gambut diperpanjang melalui Instruksi Presiden No. 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Pemerintah melalui kementrian kehutanan menyatakan bahwa kebijakan moratorium dilanjutkan untuk terus memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan. Kebijakan moratorium sebelumnya yang diterapkan selama dua tahun, telah memberi manfaat dalam mencegah kerusakan hutan yang makin parah karena peman-faatan komersial. Dikatakan bahwa awal tahun 2013, penebangan hutan alam (deforestasi) hanya sekitar 450 ribu hektar per tahun, padahal pada tahun 1998 terjadi deforestasi sebesar 2 juta Ha sedangkan antara 2001 hingga 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar pertahun seiring diterapkannya otonomi daerah. Keberhasilan menekan kerusakan dan penebangan hutan secara liar ini menyebabkan kebijakan moratorium terus dilanjutkan oleh pemerintah saat ini.

**Gambaran industri dan nilai ekspor hasil hutan**

Dalam tahun 2001, nilai ekspor hasil hutan (terutama berasal dari hutan alam), tercatat sebesar US$ 4.445 juta. Dari jumlah ini, kayu olahan tercatat menyumbang sebesar 98,2% sementara kayu gelondongan dan produk hasil hutan non kayu (HHNK) masing-masing hanya sebesar 1.5% dan 0.2 %. Dalam tahun yang sama, total hasil ekspor non minyak bumi tercatat sebesar US$ 43.685 juta. Adapun ekspor hasil hutan menyumbang 10.2 % dari jumlah ini dan berada pada tempat ke tiga hasil ekspor nasional non migas. Hasil ekspor barang elektronik dan tekstil menyumbang masing masing sebesar 14.8% dan 17.5 % dari sektor ekspor non minyak bumi. Meskipun hasil hutan berperan kecil dalam total pendapatan domestic bruto (GDP), namun kontribusi itu menciptakan kesempatan kerja baik pada tahap pemanenan (eksploitasi), maupun pada industri primer dan sekunder . Hal ini juga penting bagi kelangsungan hidup para pengusaha kecil dan sektor informal yang terkait dengan pengusahaan hutan. Sejak tahun 2005 subsektor kehutanan hanya menyumbang 1% terhadap PDB, dan bahkan tahun 2009 menurun, hanya sebesar 0,8%. Kecilnya kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB ini disebabkan karena hanya dihitung dari komoditi primer, yaitu kayu log, rotan, jasa kehutanan, dll. Sementara itu, berdasarkan PP No.6 tahun 2007 jo. PP No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, cakupan binaan Kementerian Kehutanan meliputi hasil produk primer kehutanan sampai industri kehutanan seperti industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, panel kayu dan veneer. Sampai saat ini, penyajian Nilai Tambah Bruto Industri Kehutanan di PDB masih tergabung di dalam subsektor Industri Pengolahan Non Migas.

Nilai total dari perdagangan global produk hasil hutan (dilihat dari segi Impor) diperkirakan mencapai US$ 160 milyar dalam tahun 2000. Pada tahun 2008, perdagangan kayu gergajian, pulp, kertas dan kayu lapis di pasar international turun menjadi US$150 miliar atau lebih dari 2 persen nilai total perdagangan di dunia. Dua pertiga dari produksi dan konsumsi hasil hutan tersebut dihasilkan di negara berkembang yang mempekerjakan sejumlah besar penduduk di pedesaan. Mengingat terbatasnya pangsa produksi, sebagai-mana disinyalir oleh sebagian pengamat, maka perdagangan ini dinilai sebagai faktor atau kontributor utama yang menyebabkan kerusakan hutan tropis. Di sebagian negara-negara Asia Tenggara, produksi hasil hutan yang berorientasi ekspor, tercatat sebagai penyebab utama kehilangan dan degradasi hutan.

Perdagangan adalah salah satu faktor pendorong terjadinya eksploitasi hutan baik yang resmi maupun yang *“illegal”*, khususnya di negara-negara tropis. Perdagangan internasional, tidak diragukan lagi, adalah pemicu utama sebagai akibat pola konsumsi kayu di negara-negara Barat termasuk di Asia. Pola pasar “lama” bergeser (yang mungkin saja sudah terlambat), ke dalam suatu pola konsumsi yang lebih bertanggungjawab, sementara pola pasar yang “baru” terus melanjutkan pola konsumsi lama yang terus bertumbuh terhadap kayu dan produk kayu tropis.

Sampai dengan akhir tahun 2000, ekspor produk kayu Indonesia ke pasar dunia masih didominasi oleh kayu lapis, diikuti pulp kayu dan kayu gergajian. Nilai ekspor total produk kayu Indonesia pada tahun 1998 berkisar US$ 7.219 milyar. Dari jumlah ini, pangsa pasar produk kayu primer mencapai 47.0% sedangkan produk kayu sekunder sebesar 53%. Pada tahun 2001, pangsa produk kayu primer mengalami kenaikan sampai 54.6% dan pangsa ekspor produk kayu sekunder mengalami penurunan hingga 45.4%. Kondisi terakhir menunjukkan bahwa hingga Juli 2012, nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia mencapai US$ 5,91 miliar. Pada periode yang sama, nilai ekspor tercatat US$ 5,75 miliar. Kertas menyumbang nilai ekspor terbesar, yaitu US$ 2,36 miliar, sedangkan kayu lapis atau plywood dan pulp masing-masing berkontribusi US$ 1,17 miliar dan US$ 869 juta.

Ekspor produk kayu primer ke pasar dunia masih didominasi oleh kayu lapis, diikuti dengan pulp kayu dan kayu gergajian. Namun demikian, pangsa ekspor kayu lapis dalam jumlah dimaksud mengalami penurunan lagi hingga 36.8%. Sementara itu, pangsa ekspor pulp kayu dan kayu gergajian naik masing-masing 11.3% dan 16.1%. Selanjutnya, produk kayu olahan mempunyai pangsa pasar yang signifikan dalam ekspor produk kayu dari Indonesia (lebih dari 40%), dan beberapa produk memegang peranan penting dalam pasar internasional. Produk produk lain yang memiliki pangsa pasar impor global lebih dari 10 % adalah kursi bambu/ rotan (50%) dan kayu keras campuran (20%). Produk yang memiliki pangsa pasar antara 5%-10% meliputi daun pintu kayu (9%), bahan bangunan kayu lainnya (6%), ukiran ukiran kayu (6%), furniture kayu lainnya (6%), perangkat kamar tidur kayu (5%), dan rangka lukisan (5.5%). Secara keseluruhan pangsa pasar Indonesia di pasar dunia untuk produk kayu sekunder hanya berkisar 5% tetapi umumnya cenderung menurun tipis.

Mengingat tekanan ekspor ke pasar internasional yang mana berada pada pertumbuhan, menunjukkan bahwa kompetisi produk-produk kayu Indonesia akan menjadi ancaman di masa depan. Alasannya adalah menipisnya pasokan kayu berkualitas tinggi, merajalelanya penebangan dan perdagangan liar, serta kondisi pengolahan kayu primer lokal, yang senantiasa masih berkonsentrasi pada kayu lapis dan kayu gergajian tanpa kontribusi nilai tambah yang signifikan atau tanpa diversifikasi produk. Lewat era ekspansi ekspor, posisi Indonesia teramankan oleh keunggulan komparatif, akan tetapi keunggulan ini menjadi terbatas (sepanjang sumber daya dengan biaya rendah masih terdapat di seluruh negeri). Hal ini belum terhitung sebagai langkah apapun ke depan yang bisa disebut sebagai keunggulan kompetitif, yang dinamis yang seharusnya menjadi target. Ketersediaan bahan baku baik kualitas maupun kuantitas serta aksesibilitasnya menjadi penyangga atau pendukung Indonesia untuk naik ke posisi tersebut. Kegagalan dalam mengantisipasi hal seperti ini akan membuat kejayaan Indonesia yang pernah menjadi pengekspor utama kayu lapis dunia, hanya akan tinggal sebagai ceritera belaka.

**Analisis Pasar Internasional**

Kecenderungan global sepanjang tahun 2000 an adalah bahwa ekspor kayu olahan primer dari hutan tropis mengalami penurunan. Perdagangan internasional untuk produk kayu bernilai tambah khususnya furnitur mengalami liberalisasi yang pada gilirannya mening-katkan impor terhadap komponen komsumsi sehingga menciptakan peluang peluang ekspor yang lebih besar bagi negara negara berkembang. Perdagangan internasional untuk furnitur, pelengkap bahan bahan bangunan kayu dan kayu pertukangan serta kayu profil mencapai nilai total sebesar US$ 33.7 milyar pada tahun 2000 dan terus menurun dari waktu ke waktu. Sampai dengan periode dimaksud, Indonesia menduduki peringkat nomor satu untuk kayu lapis tropis serta mebel rotan dan bambu dan peringkat dua untuk kayu gergajian daun lebar, moulding/kayu profil, juga ukiran kayu dan daun pintu kayu. Pada produk produk lain Indonesia biasanya termasuk dalam 5-10 pemasok utama.

Perbandingan harga dari sisi pengimpor (CIF) memperlihatkan bahwa kebanyakan produk produk Indonesia dibayar lebih rendah dari harga rata rata. Mata uang dollar Amerika yang mendominasi harga, cenderung berpengaruh secara luas pada produk produk padat karya seperti ukir ukiran, pintu dan kamar tidur kayu serta furnitur lain. Sebaliknya, kayu lapis tropis Indonesia terlihat cukup aman dengan harga premium di atas pesaing pesaingnya.

Fluktuasi nilai tukar merupakan katalisator penting bagi ekspor Indonesia. Sejak tahun 1997, nilai rupiah merosot tajam sehingga mempengaruhi margin keuntungan bagi nilai ekspor yang dibayar dengan mata uang asing. Hal ini paling nampak pada ekspor pulp kayu dimana biaya produksi dipotong hingga sepertiga sementara harga pasar internasional (dollar dan euro) tetap sebagaimana adanya.

**Kompetisi dan Subtitusi**

Sampai dengan tahun 2002, Indonesia mampu meningkatkan pangsa pasar untuk kayu gergajian, pulp kayu kimia, furnitur kamar tidur kayu dan furnitur berkayu lainnya. Untuk produk yang lain mengalami kehilangan pangsa pasar khususnya kayu profil/moulding (turun 11.2%) dan kayu lapis tropis (-7.4%). Selanjutnya, pangsa pasar cenderung menurun pada produk produk lainnya. Produk produk Indonesia sangat jarang bersaing pada segmen pasar yang tinggi (produk produk primer) yang disebabkan oleh kendala kualitas serta inovasi produk yang terbatas. Nilai tambah kayu lapis adalah pengecualian dimana Indonesia telah mampu untuk menciptakan kualitas yang ditentukan contohnya di pasar Jepang. Ukiran-ukiran kayu adalah kelompok produk di mana Indonesia berada pada kualitas tertinggi di dalam pasar tetapi hanya mengendalikan harga secara lemah.

Produk subsitusi lain untuk kayu lapis Indonesia sebagaimana dilaporkan adalah papan MDF (Papan serat kerapatan sedang), plywood dari kayu lunak dan papan gypsum untuk plafon/langit langit. Subsitusi bahan dari kayu juga telah terjadi dimana beberapa jenis hutan tanaman mempunyai potensi untuk menggantikan hasil hutan alam tropis, yang pada gilirannya mendorong produk-produk dimaksud pada tingkat kematangan dan kemudian merosot dalam suatu siklus hidup produk *(Product Life Cycle)*.

Pesaing pasar terdekat dari Indonesia datang dari negara negara ASEAN dan China. Jenis kayu dan produk yang ditawarkan cenderung sama dan pembeli pembeli internacional memperlakukan wilayah ini sebagai pemasok utama khususnya furnitur. Subsitusi terjadi dengan mudahnya antara negara negara pemasok yang berbasis harga maupun kualitas, dan antara produk produk yang melayani penggunaan akhir yang sama (contohnya kayu lapis menggeser posisi papan-papan lainnya), dan di antara jenis yang digunakan misalnya kayu ramin diganti kayu karet. Produk kayu yang direkayasa dan metoda pengolahan baru juga dapat menyebabkan adanya subsitusi.

**Situasi Bahan Mentah**

Biaya produksi produk kayu Indonesia cenderung mengalami peningkatan sebagai hasil kenaikan harga kayu bulat (masalah ketersediaan dan akses) serta masalah keuangan lain seperti yang berasal dari reformasi ekonomi yang terjadi sejak 1998. Pengenaan pajak baru ditingkat daerah dan pengurangan subsidi BBM memainkan peranan yang khusus. Kenaikan dalam harga kayu bulat terutama disebabkan oleh persaingan yang tinggi dalam penggunaan kayu bulat oleh industri kayu yang berorientasi ekspor. Tingginya harga kayu gelondongan juga didorong oleh banyaknya tindakan penebangan dan perdagangan liar. Hutan tanaman saat ini telah mencapai kematangan di beberapa negara di wilayah Asia Pasifik dan dapat diharapkan membantu mengurangi defisit kayu dari hutan alam. Indonesia harusnya mencoba untuk berada dalam tren ini ketika dalam skala tertentu sumber daya kayu dapat diperoleh dari hutan tanaman yang mana memiliki potensi yang sangat luas untuk keluar dari berbagai masalah kualitas seperti yang dihasillkan dari pengeringan kayu, penyambungan dan tekhnologi perekatan, serta pengawetan kayu dan berbagai produk akhir lainnya.

Pemanenan yang efesien dan harga kayu yang rendah di kilang penggergajian dari kayu hutan tanaman akan mempengaruhi pengolahan primer bersama dengan rendahnya upah buruh hal ini merupakan keunggulan kompetitif bagi para produsen di negeri ini. sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya bahan baku akan dibebankan kepada konsumen akhir sebagai produk yang tidak mahal serta ini akan meningkatkan persaingan produk kayu didalam pasar sekaligus mungkin menurunkan tingkat subsitusi kayu oleh bahn bahan sintetis. Dalam istilah absolut dan relatif, margin profit pada sisi produsen akan mengalami penurunan. Ini akan mendorong terjadinya proses pengolahan domestik untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pelarangan ekspor kayu bulat selama ini. Industri kayu primer dan industri selanjutnya menikmati harga yang murah (subsidi) dari bahan baku kayu ketimbang berada dibawah kompetisi dengan negara lain, dan pemerintah kehilangan pangsa pendapatan relatif (royalti). Kebijakan ini membantu mempertahankan ketidak-efesienan industri primer dan industri lanjutan yang seharusnya dipertimbangkan kembali.

Faktor faktor yang disebutkan ini menuntut strategi pemasaran yang ada untuk produk produk kayu seyogyanya disesuaikan dengan kenyataan yang ada serta tren pembangunan di masa datang. Kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat sangat mendukung kompetisi harga bagi produk produk kayu Indonesia, tetapi mendatangkan dampak sampingan seperti pasokan berlebih yang terjadi secara struktural, dan citra produk yang tersisihkan setidaknya kayu bulat harus berasal dari hasil penebangan resmi dari hutan yang lestari. Dampak dari kompetisi harga yang sangat kuat dan pajak yang relatif tinggi dari beberapa produk menyarankan bahwa industri yang berbasis kayu, harus berusaha keras untuk memperbaiki tekhnologi pengolahan untuk menghadapi tantangan merosotnya ketersediaan kayu bulat dan memaksimumkan manfaat ekonomi secara optimal (pengolahan primer) serta meningkatkan efesiensi pengolahan. Berkembangnya hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup menyarankan bahwa pasokan kayu seharusnya tergantung pada (tanpa kecuali) hutan yang lestari, yang diverifikasi dengan sertifikasi serta dikomunikasikan lewat pemberian label.

**Perdagangan bebas serta hambatan tariff dan non tariff.**

Secara teoritis, liberalisasi perdagangan akan memperluas volume dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam perdagangan internasional. Banyak hasil studi yang mendukung satu dari sekian banyak asumsi dasar dari liberalisasi perdagangan, yakni sebagian besar konsumen dapat menerima upah yang rendah, yang sesungguhnya mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan yang tinggi. Manfaat ini di satu pihak dibayangi oleh fakta bahwa kadang-kadang negara produsen sekaligus konsumen tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Negara produsen sekaligus konsumen yang berasal dari negara-negara kaya seringkali mengalami kerugian daripada kenaikan keuntungan. Peluang-peluang produsen yang diciptakan lewat perdagangan yang besar, seringkali, bergantung pada struktur biaya komparatif dan keunggulan kompetitif.

Tidak ada mekanisme kompensasi bagi mereka yang menderita kerugian oleh mereka yang memperoleh keuntungan. Masalah yang digaris-bawahi, adalah pembagian manfaat dan pendapatan yang lebih berimbang dalam liberalisasi perdagangan dunia. Perjanjian perdagangan regional mempunyai dampak yang sama terhadap penurunan volume dan harga, namun masih pada derajad yang lebih rendah dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaannya.

Dalam kasus Indonesia, nampaknya bahwa pembukaan perdagangan produk-produk kayu membuat para pengekspor makin mengalami kesulitan menghadapi kenyataan kompetisi di pasar internasional, termasuk persaingan dalam impor ke Indonesia. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan akan membuka peluang-peluang baru jika negara ini mengelola hutan tropisnya secara lestari serta melaksanakan iklim produksi yang lebih efisien dan lebih kompetitif.

Penghalang tarif untuk produk-produk kayu umumnya telah dapat ditekan serendah mungkin, dan untung ruginya liberalisasi perdagangan saat ini justru terjadi di antara para pedagang kayu di Indonesia. Sebaliknya, tindakan-tindakan non tariff (NTM’s) justru menjadi naik dan mempengaruhi kinerja pengekspor secara signifikan. Sebagai contoh, initiatif masyarakat Eropa (EU) tentang pengelolaan hutan, penerapan hukum serta perdagangan secara lebih bertanggung jawab, permintaan sertifikasi kayu yang berkelanjutan serta legalitas dari verifikasi penebangan hutan memberikan dampak lebih baik bagi pasar produk kayu Indonesia di pasar Eropa. Penerapan penghambat non tariff (NTM’s) saat ini lebih terjadi di negara-negara berkembang dibanding negara-negara maju. Hal ini adalah benar bagi negara-negara Asia yang mencoba memasuki pasar “kaya” seperti di Canada, Uni Eropa, Jepang dan USA.

Tarif impor, khususnya pada kayu lapis dan beberapa produk kayu olahan cenderung relatif tinggi di beberapa negara pengimpor utama. Di negara-negara ini, juga telah dilangsungkan kampanye yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan (UE & USA) yang menekankan bahwa produk kayu yang diperdagangkan harus dipanen dari hutan yang dikelola secara lestari. Adanya permintaan terhadap sertifikasi manajemen hutan, mekanisme pengamanan hutan dan hasil-hasil serta legalitasnya tidak dapat diperoleh tanpa adanya biaya tambahan.

Di bawah mekanisme pasar kayu bulat yang kompetitif (tanpa larangan ekspor dan tanpa pajak ekspor), industri kayu gergajian Indonesia harusnya menguntungkan. Sebagai alternatif, penerapan pajak ekspor terhadap logs pada suatu tingkat maksimum sebesar 10 % (menurunkan harga log) akan meningkatkan keuntungan dari kayu gergajian sekitar 14 % atau lebih. Semakin tinggi pajak ekspor log maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh produsen dan pengekspor kayu gergajian. Keuntungan dari industri kayu lapis nampaknya akan turun dan bahkan menjadi negatif untuk beberapa produsen di bawah suatu mekanisme pasar terbuka untuk kayu-kayu bulat industri. Namun, secara keseluruhan, sektor ini akan selalu berada dalam lampu merah. Ini memberikan implikasi bahwa ketika akan dilakukan restrukturisasi industri kayu lapis, maka diperlukan proteksi terhadap harga domestik dari kayu bulat (logs).

**Kompetisi Pasar dan Perdagangan Indonesia**

Berdasarkan dinamika perkembangan industri perkayuan di Indonesia sejak 1980an, dapat dikatakan bahwa posisi ekspor kayu dan produk kayu merefleksikan suatu keunggulan komparatif yang penting. Akan tetapi keunggulan ini memiliki jangka waktu yang terbatas. Hal lain yang menunjukkan keunggulan komparatif yang lebih dinamis belum begitu nampak – tetapi hal itulah yang menjadi target yang harus dicapai untuk mengembangkan peluang pasar internasional.

Pengukuran keunggulan kompetitif hasil hutan Indonesia di pasar internasional dinilai dengan menggunakan beberapa indikator seperti Rasio Biaya Swasta (Private Cost Ratio = PCR), Indeks Keunggulan Komparatif Nyata (Revealed Comparative Advantage Index = RCAI), dan Pangsa Pasar Konstan (Constant Market Share = CMS). Setiap analisis memperlihatkan kontradiksi dalam hasil-hasilnya. PCR memperlihatkan bahwa kayu gergajian memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dari kayu lapis dan moulding. Hasil kalkulasi RCAI mengindikasikan bahwa kayu lapis justru yang paling tinggi keunggulan komparatifnya, sekalipun pada awal 2000-an terjadi penurunan. Kayu gergajian kurang kompetitif di pasar dunia.

Sehubungan dengan industri kayu sekunder, sejumlah produk (bambu, bangku/kursi, ukiran kayu, furniture kayu lainnya, furniture kamar tidur berkayu) menunjukkan kenaikkan RCAI yang kuat. Hasil analisis menunjukkan terjadi perbaikan keunggulan komparatif di pasar dunia untuk produk ini. Analisis CMS untuk pertumbuhan ekspor kayu lapis untuk 10 negara pengimpor utama memperlihatkan bahwa ada banyak alasan bagi kesuksesan Indonesia. Catatan bagi ekspor kayu lapis mengalami pertumbuhan yang baik sebelumnya, terjadi di 3 negara yakni Kanada, Perancis dan Inggris. Pertumbuhan ekspor kayu lapis Indonesia ke China pada periode yang sama, hampir seluruhnya (94,15%) disebabkan oleh kenaikkan umum dalam permintaan, dan hanya sebagian kecil (5,85%) sehubungan dengan adanya kompetisi.

**Perspektif Perdagangan Internasional**

Ada beberapa kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka mempertahankan peran sub sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia maupun dalam perdagangan internasional yakni dengan cara-cara berikut ini:

*(1). Pembatasan oleh Pasar Internasional atas ekspor hasil hutan dari Indonesia:* Dampak utama adalah pada peningkatan aspek kualitatif. Pasar dunia (demand) tetap bertumbuh dan Indonesia nampaknya cukup kompetitif dalam harga namun banyak peluang pasar baru yang lebih menekankan pada persyaratan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup dan legalitas.

*(2). Pengembangan pasar baru bagi Indonesia secara aktif (negara atau ceruk pasar):* Industri kayu Indonesia nampak sebagai pasar yang pasif terhadap harga dan juga hanya sebagai penerima order serta tidak proaktif dalam mengeksplorasi pasar baru atau melakukan penyesuaian produk untuk berbagai tujuan ekspor.

*(3). Efisiensi ekonomi dalam alokasi kayu dan pasarnya:* Pasar kayu bulat cukup kuat dikendalikan, dimana kompetisi dan dinamika dapat diatasi. Cabang-cabang industri tidak bekerja secara transparan, sehingga kapabilitas pembayaran kayu dan tingkat profitabili-tasnya tidak mudah terlihat dengan baik.

*(4). Keberlangsungan struktur ekspor saat ini (profitabilitas, keseimbangan sosial untuk manfaat dan ketenaga-kerjaan serta perlindungan lingkungan):* Lewat definisi ulang maupun pengalaman empiris, struktur ekspor dan perdagangan saat ini tidaklah berkesinambungan.

*(5). Posisi Pasar dan Kepemimpinan:* Indonesia lebih bersifat penerima harga dari pada pengembang pasar yang aktif. Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam perdagangan kayu lapis pada waktu lalu, namun secara umum, masih kurang inisiatif dalam ekspor produk-produk kayu lainnya.

*(6). Kebijakan dan Insentif Ekonomi untuk mendukung industri sekunder yang mempunya nilai tambah yang tinggi:* Dukungan yang kuat lewat suatu kebijakan yang efektif sangatlah dibutuhkan. Bagaimanapun, Indonesia tidak dapat mengabaikan dampak berlawanan dari intervensi pasar yang telah terjadi pada industri primer dan berhadapan dengan tantangan untuk pengembangan industri sekunder maupun tersier. Analisis yang hati-hati dibutuhkan untuk menentukan apakah manfaat-manfaat yang diperoleh akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih penting, termasuk distorsi pasar dalam jangka panjang.

*(7). Pergeseran dari penggunaan bahan baku dari hutan alam ke hutan tanaman:* Indonesia tidak akan dapat menghindari suatu perobahan untuk menggeser pola pengguna-an bahan baku untuk industri kayunya. Hasil yang diperoleh dari kayu-kayu tropis bernilai tinggi selama ini, yang masih dapat dipanen harus dimaksimalkan usaha pelestariannya. Pengolahan dan keragaman produk perlu disesuikan dengan pergeseran dimaksud ke arah penggunaan maksimum dari hutan tanaman secara lestari agar dapat mempertahankan posisi kompetitif dan menangkap segmen pasar yang baru pada industri kayu sekunder.

Berikut ini, marilah kita memberikan analisis terhadap kompetisi dan kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu dari Indonesia;

**Kompetisi dan Kebijakan Perdagangan**

*(1). Pangsa Pasar Indonesia dan Kompetisi yang Merosot:* Seperti diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia dinilai lebih rendah di belakang China, Vietnam dan mungkin pula beberapa produsen Asia lainnya. Indonesia dalam arti khusus memang menurun dalam hal kompetitif namun terus berupaya memperbaiki posisi pasar dan kompetitisinya yang berbasis pada sumberdaya berbiaya rendah, termasuk tingkat upah buruh dan harga kayu bulat yang rendah. China saat ini menikmati keunggulan ‘biaya rendah’ dalam kaitan dengan tenaga kerja. Efisiensi yang rendah, perbaikan teknologi dan efisiensi ekonomi yang lebih besar harus menjadi pengendali kompetisi di masa datang.

*(2). Dampak faktor pembatas Sumberdaya, Citra Lingkungan dan Kualitas Produk (standart) pada Posisi Perdagangan Indonesia:* Seluruh faktor dimaksud telah merupakan serangan bagi Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Dampak ini bersifat ganda dan solusi kebijakan harus mengarahkan untuk mencari sumber bahan baku yang memiliki produk bernilai tambah serta mendukung ekspor lebih dari pada sekedar pasar domestik.

*(3). Isu-isu kebijakan yang muncul adalah sejauh mana intervensi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal:* Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pasar bebas dapat mengantar kepada derajad tertinggi dari penggunaan bahan baku dan efisiensi industri yang optimal. Sementara pemerintah Indonesia mendorong ke arah produksi dan alokasi pasar serta tipe regulasi pasar sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengatasi pasar yang tidak sempurna sebagai suatu isu yang penting.

*(4). Mencapai suatu kerangka keseimbangan pasar dan kebijakan-kebijakan untuk itu:* Indonesia saat ini perlu menyeimbangkan pasar dan lembaga perdagangannya, regulasi, skema pajak dan kebijakan untuk mengintegrasikan maksud-maksud potensial dan untuk menghindari konflik antara pelarangan ekspor kayu bulat, ekspor di bawah regulasi pajak dan perdagangan kayu yang tidak teratur di bawah proses leberalisasi perdagangan. Indonesia harus melakukan analisis yang hati-hati sehubungan dengan berbagai kebijakan yang saling bercampur daripada sekedar menangani masalah kebijakannya secara partial. Analisis dampak ekonomi dengan analisis kepekaan yang tepat akan membantu mempersiapkan langkah-langkah perbaikan ke depan. Konsistensi jangka panjang untuk pedoman pembuatan kebijakan dibutuhkan untuk menggantikan isu-isu yang ada sebagai langkah pengendalian.

**Strategi Yang Direkomendasikan**

Strategi baru diperlukan untuk membantu industri perkayuan Indonesia guna mengadaptasi perobahan ekonomi secara dinamis, kondisi sosial dan lingkungan dari masyarakat perdagangan baik domestik maupun yang di luar negeri dan mengoperasikannya dalam suatu kondisi yang menguntungkan secara lebih fleksibel serta untuk meningkatkan nilai tambah bersih, lewat kompetisi dan pasar yang tidak terdistorsi.

Suatu pendekatan dengan matriks perbandingan yang strategis digunakan untuk mengevaluasi 3 strategi alternatif melawan kondisi *benchmark* yang status quo.

“Status Quo” didefinisikan sebagai promosi ekspor terlebih dahulu, sementara itu abaikan dulu pengembangan pasar domestik. Hal ini nampaknya mendukung apa yang terjadi saat ini, yang merupakan campuran dari ekonomi pasar dan intervensi pemerintah yang terjadi secara regular. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya distorsi terutama pada produk kayu lapis.

Alternatif strategi pertama “yang baru” teridentifikasi sebagai *“Inti Pasar Domestik”*, yang berarti suatu strategi penting digunakan untuk mendorong permintaan domestik pada pengeluaran untuk ekspor. Telah diestimasi bahwa sekurang-kurangnya 1/3 output industri kehutanan dikonsumsi oleh pasar domestik.

Alternatif strategi ke dua yaitu *“Value-added Exports”* berjalan juga dengan suatu maksud hanya mendukung ekspor yang dianggap mempunyai nilai tambah bersih yang tinggi. Ini akan memberikan jaminan suatu pertimbangan yang baik karena manfaat ganda dari pengolahan kayu secara teoritis dapat diperoleh lewat berbagai skenario.

Alternatif strategi ke tiga agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini disebut dengan *“Pasar Besar Tidak Terdistorsi”*, dimana hanya ada sedikit sekali intervensi pemerintah lewat penerapan distorsi pasar struktural yang dizinkan oleh regim perdagangan WTO / AFTA. Hal mana dapat diterapkan sebagai pedoman perdagangan bagi produk kayu dari Indonesia.

Jika dilaksanakan sehubungan dengan Strategi Opsi ke dua (dukungan yang diluncurkan untuk mendukung nilai tambah ekspor), hal ini akan mempunyai suatu kesempatan yang lebih baik untuk melawan pengawasan badan internasional dan mitra dagang, serta mengarahkan industri perkayuan Indonesia ke arah jalur yang lebih berkesinambungan atau lestari.

KESIMPULAN

1. Diperlukan adanya suatu kekuatan dan kemauan politik untuk melaksanakan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Penebangan Liar dan Penyelundup-an Kayu sambil mensukseskan upaya reboisasi dan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan.
2. Hutan tanaman industri (HTI) yang dicanangkan sebagai sumber bahan baku industri kayu terpadu, diprediksi akan menyumbang sekitar 25 juta m3 (APHI, 2012). Angka ini mendekati atau hampir sama dengan rata-rata yang dipanen dari hutan alam per tahun yaitu sekitar 20 juta m3 bahkan pernah mencapai 30-an juta m3 di pertengahan tahun 1980-an.
3. Perbedaan data antara Kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan juga dengan FAO memperlihatkan bahwa sesungguhnya jumlah kayu yang ditebang di hutan alam adalah jauh lebih besar dan angka ini belum termasuk penebangan liar *(illegal logging)* yang diselundupkan ke luar negeri atau diperdagangkan secara gelap *(wood smuggling)*. Pada gilirannya, kerugian negara akan semakin besar sehingga impor kayu bulat, “terpaksa” akan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan industri perkayuan dalam negeri.
4. Jarak merupakan fungsi dari biaya -*jika impor terjadi*- sehingga harga produk olahan akan menjadi semakin tinggi. Dengan demikian harga kayu olahan tidak akan kompetitif dan sekaligus tidak terjangkau oleh masyarakat di pasar domestik.
5. ***Penebangan hutan*** benar-benar hanya diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan disesuaikan dengan perhitungan yang matang atas riap produksi hutan dan jatah tebang tahunnya *(Annual Allowable Cutting)*. Jika hutan adalah untuk kesejahteraan masyarakat maka perlu diupayakan pengembangan hutan rakyat dengan jenis-jenis cepat tumbuh *(fast growing species)* yang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman-tanaman pertanian semusim. Dengan demikian masa depan hutan Indonesia lebih dapat terjamin. Untuk itu perlu didukung kebijakan perpanjangan moratorium penebangan hutan oleh pemerintah sampai tercapai suatu kestabilan ekosistem.
6. Restrukturisasi industri diperlukan, bila perlu dilakukan perobahan industri perkayuan secara total dan mengarah kepada produk yang kompetitif dan tidak terus bertumpu pada kayu lapis. Ketergantungan pada capital dan mesin-mesin yang diimpor masih menyebabkan produk kayu Indonesia berada pada posisi *“buyer market”* dan belum bisa kompetitif seperti negara-negara lainnya. Industri kayu yang dicari adalah yang mampu dibeli secara domestik dan juga diminati di pasar internasional. Nampaknya industri meubel kayu dan *wood-working* akan merupakan pilihan yang baik.
7. Industri dan pemasaran kayu tropis Indonesia bisa berjalan dengan baik jika disertai dengan tindakan berikut ini; Risalah ulang potensi sumberdaya hutan yang masih tersisa. Mengkaji ulang potensi konsumsi domestik (harus bisa dipenuhi). Meningkatkan efisiensi pemanenan dan industri kayu serta penghematan dalam pemakaian kayu. Miliki komitmen, terus konsisten serta konsekuen dengan pemberatasan *illegal logging* dan *wood smuggling*. Memacu pembangunan hutan dan rehabilitasi lahan lewat berbagai metoda seperti; reboisasi, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, hutan tanaman industri, tumpang sari dengan sistem penanaman padat karya, perkebunan, agroforestry, dsb.
8. Pengelolaan sumberdaya alam hutan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan segala peraturan dan perundangan yang berlaku, agar selalu diarahkan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menambah jumlah lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan tetap menjaga lingkungan hidup yang optimum dan lestari. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2002. International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan, 2003.

Astana, S. and M. Zahrul Mutaqin. 2002. Export Tax Policy on Wood Products. Final Report. Center for Social, Cultural and Economic Research and Development on Forestry (CESERF), Bogor.

Bourke, I.J. 1998 and J. Leitch. 1998. Trade Restrictions and Their Impact on International Trade in Forest Products. FAO, Rome.

BAPLAN/FPB. 2002. Statistik Kehutanan Indonesia/Statistics of Indonesian Forestry 2001. Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan/Forestry Planning Board, Ministry of Forestry. Jakarta.

Departemen Kehutanan, 2008. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2008. Bahan Menteri Kehutanan pada Sidang Kabinet, 20 Maret 2008.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007. Penetapan Ancar-ancar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Jakarta Nopember 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007. Pedoman Umum : Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat Yang Berkelanjutan, Ramah Lingkungan, dan Berdaya Saing, Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani. Ditjen RLPS, Jakarta, Mei 2007.

DEPPERINDAG/MIT. 2010. Ekspor Non Migas Utama Menurut Sektor/Major Non-Oil Exports by Sector. http://www.dprin.go.id. Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Ministry of Industry and Trade, Jakarta.

DEPHUT/MoFor. 2003. (Draft) Rencana Stratejik Departemen Kehutanan/Strategic Planning of Ministry of Forestry 2001-2005 (Penyempurnaan/Revised). Departemen Kehutanan/Ministry of Forestry, Jakarta.

Fahutan IPB. 2008. Levies Study on Management of Natural Production Forest. APHI and Fahutan IPB (Faculty of Forestry, Bogor Agricultural Univ.), Bogor.

FAO. 2008. Trade and Sustainable Forest Management - Impacts and Interactions. Co-Chairs' Summary. The expert consultation was organized by FAO and

FoEh, John. 2004. Gambaran Statistik, Produksi, Industri dan Pemasaran Produk Kayu Indonesia. International Market Analysis Working Paper, Study C-2; INDONESIA - ITTO PROJECT ITTO PD 85/01 Rev. 2(I).

FoEh, John E.H.J., 2003. Water and Forest Protection Project. Implementation of Community-Based Forest Management in Java. World Bank and DFID Innovation Project. February – June 2003. *Resource Economist Project Report*, Perum Perhutani, Jakarta.

FoEh, John E.H.J. dan Roma K. Purba, 2012. Analisis Finansial Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan. Jurnal Manajemen DeReMa, Vol. 6, No. 3, September 2011. Hal. 347-364. ISSN 1907-0853

Jukka Tissari and Satria Astana with the contribution of John FoEh and Imam Santoso, 2004. International Market Analysis: Strategy for the Development of Sustainable Wood-based Industries in Indonesia. INDONESIA - ITTO PROJECT ITTO PD 85/01 Rev. 2(I).

Kementrian Kehutanan RI, 2012. SIARAN PERS Nomor: S.178/PHM-1/2011. Mengukur Kembali Kontribusi Kehutanan Terhadap PDB.

Universitas Gadjah Mada, 2003. Hutan Desa : Alternatif Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Seminar Sehari Kerjasama Yayasan Damar dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 23 April 2003.

1. Materi Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang - NTT, tanggal 7 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-1)
2. Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Alam, Universitas Pelita Harapan, Jakarta [↑](#footnote-ref-2)